



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOPA EKA PRAWATYA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 842282

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.686.650.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 322.200.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 162.450.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/68.8 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, GESITS G1 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 350.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	190.634.244
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.477.284.244
III. HUTANG	Rp.	322.285.222
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.154.999.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.